

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Ekonomi Masyarakat

Moser dalam Daulay (2010: 77) membuat kerangka analisis yang disebut *The Asset Vulnerability Framework*.¹ Kerangka ini meliputi berbagai pengelolaan aset, (1) aset tenaga kerja (*labour assets*), misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan anak-anak dalam keluarga untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga, (2) aset modal manusia (*human capital assets*), misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas orang untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang menentukan kembalian atau hasil kerja (*return*) terhadap tenaga yang dikeluarkannya, (3) aset produktif (*productive assets*), misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya, (4) aset relasi rumah tangga atau keluarga (*household relation assets*), misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja

¹ Dalam konteks keluarga miskin, menurut Moser dalam Suharto (2002: 6), strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola atau memenej berbagai aset yang dimilikinya. Moser mengistilahkannya dengan nama “asset portfolio management”. Berdasarkan konsepsi ini, Moser membuat kerangka analisis yang disebut “*The Asset Vulnerability Framework*”.

dan mekanisme “uang kiriman” (*remittances*), dan (5) aset modal sosial (*social capital assets*), misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal, dan pemberi kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.

Menurut Scott dalam Daulay (2010: 77), kelompok masyarakat miskin melakukan upaya-upaya strategi ekonomi untuk bisa bertahan, dengan cara: pertama, mereka dapat mengikat sabuk lebih kencang dengan mengurangi frekuensi makan dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Kedua, menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau melakukan migrasi. Ketiga, menggunakan jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi.

Korten dan Sjahrir dalam Daulay (2010: 77), menjelaskan bahwa strategi kelangsungan hidup yang ditempuh oleh kelompok miskin antarlain para anggota rumah tangga menganekaragamkan kegiatan kerja mereka, berpaling ke sistem penunjang yang ada di desa seperti sanak saudara atau keluarga yang lebih kaya yang mungkin dapat menyediakan bantuan, bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit makan, yang berarti meminimalkan konsumsi dan bahan-bahan pokok lainnya, dan meninggalkan tempat yang selama ini ditempati.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa bentuk strategi ekonomi bertahan hidup keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, peningkatan aset dengan cara melibatkan lebih banyak anggota keluarga untuk bekerja, memulai usaha kecil-kecilan, memulung barang-barang bekas, menyewakan kamar, menggadaikan barang, meminjam uang di bank atau lintah darat. Kedua, pengontrolan konsumsi dan pengeluaran hal ini dilakukan dengan cara mengurangi jenis dan pola makan, membeli barang-barang murah, mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, mengurangi kunjungan ke desa, memperbaiki rumah atau alat-alat rumah tangga sendiri. Ketiga, pengubahan komposisi keluarga yaitu migrasi ke desa atau ke kota lain, meningkatkan jumlah anggota rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan, menitipkan anak kekerabat atau keluarga lain baik secara temporer maupun permanen.

1. Strategi Ekonomi Masyarakat Petani

Clifford Geertz ahli antropologi Amerika Serikat, yang melakukan penelitian di Jawa pada 1957-1963, menciptakan konsep Involusi Pertanian² pada masyarakat petani. Dalam buku Antropologi Sosial Budaya karangan Fedyani Saifuddin (2011: 97), Geertz mengkaji perdesaan Mojokuto, Jawa Timur, menemukan fragmentasi lahan pertanian yang semakin serius. Sebidang sawah dibagi menjadi semakin kecil ketika diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebagai contoh, jika

² Fedyani Saifuddin (2011: 96), *Involusi* itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi yang semakin rumit (*njelimet*), proses melingkar seperti spiral ke dalam sistem, sehingga mencapai suatu keadaan yang tidak dapat berbalik arah keluar dari sistem tersebut.

seorang petani memiliki dua orang anak, maka sawah yang dimilikinya akan dibagi dua. Berlanjut ketika anak-anaknya kelak berkeluarga dan mempunyai empat anak, maka setiap bagian tadi dibagi lagi menjadi empat bagian, akhirnya luas lahan semakin lama semakin kecil. Yang menarik dan perlu diperhatikan dari konsep involusi pertanian ini adalah bahwa ada kemampuan dari petani untuk dapat bertahan dan terus memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun lahan yang dimiliki semakin lama semakin kecil.

Konsep involusi pertanian ini bagi Geertz bukanlah proses berkurangnya lahan pertanian itu sendiri, melainkan apa yang disebutnya sebagai proses berfikir, keyakinan, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi petani dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dari konsep involusi pertanian yang Geertz paparkan tersebut secara tidak langsung merupakan rangkaian strategi masyarakat petani untuk terus memenuhi kebutuhan, walaupun mereka menyadari bahwa hal itu sebagai bagian dari kebiasaan-kebiasaan yang lazim mereka lakukan.

Strategi-strategi ekonomi untuk bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah seperti petani kecil dalam menghadapi keterbatasan sumberdaya dan pendapatan. Jika dalam keluarga petani Jawa strategi yang dilakukan involusi pertanian,

maka ada juga yang mencoba melakukan *coping*³ dengan cara strategi *dual earner* atau pola nafkah ganda dimana pada saat yang sama bekerja di bidang lain misalnya sebagai tukang, berjualan kecil-kecilan, dan sebagainya.

Sunarti dan Khomsan (2007: 6) menjelaskan strategi *coping* keluarga petani miskin untuk memperoleh ketahanan pangan dilakukan sesuai tahapan tekanan ekonomi yang dihadapi. Pertama mereka akan mengurangi pangan sumber protein yang harganya mahal, kemudian mengurangi frekuensi makan dan mencari bahan pangan konvensional yang dalam situasi normal jarang dimakan. Sesuai teori Maslow, maka upaya memenuhi kebutuhan fisiologis (pangan) adalah yang pertama kali harus dilakukan untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya, anggota keluarga yang selama ini tidak mencari nafkah (anak-anak, orang tua, dan kaum perempuan) bekerja apa saja untuk mendapatkan upah tunai. Bila hal ini masih tidak memecahkan masalah, maka mereka mulai menjual aset yang dimilikinya, dan langkah terakhir adalah sebagian anggota keluarga akan melakukan migrasi mencari nafkah ke luar daerah. Mekanisme *coping* untuk mengatasi rawan pangan seperti ini tampaknya bersifat universal dan dapat terjadi di mana saja.

³ Fieldman dalam Jurnal Kesejahteraan Masyarakat Petani (2007: 6) Strategi *Coping* merupakan perilaku atau proses untuk adaptasi dalam menghadapi tekanan atau ancaman. Moser dalam Suharto (2002: 6), secara umum *coping strategies* dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Dalam konteks keluarga miskin, strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola atau memenej berbagai asset yang dimilikinya.

Dalam penelitian Sutaryono tentang Marjinalisasi Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta (2012: 14), temuan di lapangan menunjukkan bahwa rasionalitas dan kecerdasan petani diwujudkan melalui berbagai respon terhadap tekanan perkembangan wilayah dan ekspansi kapital di perdesaan. Respon yang dilakukan bervariasi tergantung pada *mindset* dan sumberdaya yang dimiliki petani, seperti: (a) petani dengan lahan luas akan cenderung menjual sebagian lahan pertanian yang harganya tinggi (aksesibilitas tinggi), kemudian membeli lahan pertanian yang harganya rendah di daerah lebih ke dalam (ke arah desa) dengan luas yang lebih besar; (b) menjual sebagian lahan pertanian untuk modal usaha lain; (c) petani pinggiran kota yang lahannya terbatas akan cenderung meningkatkan daya tawarnya dengan mempertahankan lahan pertaniannya meskipun lahan pertanian di sekelilingnya telah berubah fungsi. Hal ini dilakukan agar harga lahannya semakin tinggi; (d) petani menyewakan lahannya, kemudian ia beralih profesi menjadi pekerja di luar lahan miliknya; dan (e) petani menjual lahan pertanian hasilnya untuk modal usaha dan ia beralih profesi.

Menurut Mulyadi dalam Sugihardjo dkk (2012: 145), strategi bertahan petani tradisional adalah “mengutamakan selamat” (*safety-first*). Bagi petani miskin yang secara sosial ekonomi sangat rentan, penurunan atau bahkan kegagalan panen akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup keluarganya. Mengutamakan selamat dalam hal ini

dapat dicontohkan: petani menghindari risiko dan memusatkan perhatian pada kemungkinan penurunan panen, bukan pada usaha memaksimalkan keuntungan. Profesi lain yang berkembang adalah menjadi pengrajin (anyaman bambu, tukang kayu). Kegiatan ini seperti menjadi kegiatan sampingan karena dilakukan di sela-sela aktivitas pertanian.

2. Strategi Ekonomi Masyarakat Buruh

Dhini (2009: 74), dalam penelitiannya tentang Strategi *Survive* Buruh Bangunan di Desa Sambirejo Kabupaten Sleman Yogyakarta, memaparkan strategi keluarga buruh kontrak dalam menghadapi permasalahan keluarga, merupakan salah satu indikator variabel potensi mereka. Dalam konteks ini kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi mempunyai dinamika sesuai dengan tantangan dan perubahan sosial. Keluarga buruh kontrak mempunyai potensi untuk *survive* dalam berbagai kondisi. Dinamika dan mobilitas mereka dalam pekerjaan relatif tinggi. Dalam rangka menanggapi goncangan dan tekanan (*shock and stress*), pada dasarnya mereka mempunyai strategi yang cukup handal. Bentuk-bentuk strategi dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Strategi aktif atau optimalisasi sumber daya manusia (SDM).

Strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga untuk peningkatan penghasilan karena tuntutan hidup yang semakin besar.

Berbagai bentuk strategi yang dibangun oleh keluarga buruh kontrak antara lain: melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, serta memanfaatkan atau mengerahkan anggota keluarga untuk memperoleh penghasilan.

b. Strategi pasif atau penekanan/pengetatan pengeluaran

Penekanan/pengetatan pengeluaran merupakan strategi yang bersifat pasif, yaitu mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, biaya sosial, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya).

c. Strategi Pemanfaatan Jaringan

Strategi pemanfaatan jaringan merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh keluarga buruh dalam mengatasi masalah keluarga. Jaringan yang dimaksud adalah relasi sosial⁴ mereka, baik secara informal maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Pemanfaatan jaringan ini terlihat jelas dalam mengatasi masalah ekonomi dengan pinjam uang kepada tetangga dan warung terdekat. Kondisi ini menunjukkan, bahwa di antara mereka mempunyai solidaritas yang kuat dan saling percaya. Tampaknya teman merupakan tumpuan untuk memperoleh pertolongan dan sebagai tempat pertama yang akan dituju apabila mereka mengalami masalah. Relasi mereka tidak hanya sebatas di bidang ekonomi, tetapi mencakup bidang-bidang yang lain, misalnya

⁴ Anwar dan Adang (2013: 194), *relasi sosial* dapat dibangun melalui interaksi yang baik, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud bisa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

dalam peningkatan mental spiritual. Kegiatan ini merupakan strategi yang bersifat aktif untuk memperoleh dukungan emosional.

B. Perubahan Sosial

Davis dalam Martono (2011:4) mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pandangan serupa dikemukakan oleh Moore dalam Nanang Martono (2011:4), yang memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial⁵, pola perilaku dan interaksi sosial.

Soemardjan dalam Anwar dan Adang (2013:246) menuliskan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Hawley dalam Sztompka (2008:3) menganalisis perubahan sosial sebagai setiap perubahan yang tak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan.

Dalam pengertian ini konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan:

(1) perbedaan; (2) pada waktu yang berbeda; (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.

⁵ Anwar dan Adang (2013: 193), *struktur sosial* pada skala *makro* merujuk pada sistem stratifikasi sosial ekonomi, pada skala *meso* merujuk pada relasi sosial, pada skala *mikro* merujuk dengan cara membentuk norma-norma perilaku.

Menurut Sztompka (2008:5), bila dilihat contoh definisi perubahan sosial yang terdapat dalam buku ajar sosiologi, terlihat bahwa berbagai pakar meletakkan tekanan pada jenis perubahan yang berbeda. Namun sebagian besar mereka memandang penting perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antara unsur-unsur masyarakat:

- a. Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu (Macionis, 1987:638),
- b. Perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat (Persell, 1987:586),
- c. Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu (Ritzer, et.al, 1987:560),
- d. Perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu (Farley, 1990:626).

Perubahan sosial menurut Gillin dan Gillin dalam Anwar dan Adang (2013:246), dianggap sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang perubahan sosial di atas, perubahan sosial dapat disimpulkan sebagai perubahan segala sistem yang ada di

masyarakat, sistem itu dikenal dengan sistem sosial. Sistem sosial masyarakat dikaji dalam studi Sosiologi, oleh karena itu perubahan sosial merupakan inti dari studi Sosiologi. Karena sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat dalam suatu sistem sosial.

Perubahan sosial merupakan salah satu konsep dari pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan sosial positif yang direncanakan, terarah dan dilakukan dengan sadar/disengaja. Disisi lain pembangunan juga mempunyai berbagai masalah. Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks, dan tidak berkuat pada masalah ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek perubahan sosial.

Todaro dalam Sztompka (2008: 86) menjelaskan bahwa pembangunan haruslah ditinjau dari perspektif yang lebih luas, yaitu dalam konteks sistem sosial yaitu hubungan interdependen antara faktor-faktor ekonomis dan nonekonomis. Faktor-faktor nonekonomis ini diantaranya sikap-sikap masyarakat menghadapi kehidupan, pekerjaan dan kekuasaan, struktur administratif dan birokrasi pemerintah ataupun swasta, pola-pola pertalian keluarga dan keagamaan, tradisi-tradisi kultural, sistem-sistem pemakaian tanah/lahan, otoritas dan integritas badan-badan pemerintah, tingkat peran serta dalam keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya membawa efek positif terhadap bidang-bidang lainnya, bahkan dalam satu dan lain kasus membawa

dampak sebaliknya yaitu dampak negatif. Oleh karena itu pembangunan kampus Institut Teknologi Sumatera akan membawa perubahan sosial bagi masyarakat sekitar baik sebelum dibangun (proses perencanaan) maupun setelah pembangunannya. Perubahan sosial yang mungkin akan terjadi adalah perubahan dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, pendidikan, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, terlebih adalah adanya perubahan kebudayaan, karena perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan⁶.

C. Dampak Perubahan Sosial

Menurut Anwar dan Adang (2013: 250), arah perubahan sosial meliputi beberapa orientasi, antara lain:

- a. Perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang harus ditinggalkan atau di ubah.
- b. Perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau unsur yang memang bentuk atau unsur baru; suatu perubahan yang berorientasi pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah eksis atau pada masa lampau.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari perubahan sosial yang terjadi bisa positif, juga negatif. Masyarakat harus bisa memilih apakah mereka mengikuti perubahan yang terjadi atau sebaliknya. Semua pihak tentu

⁶ Soekanto dalam Anwar dan Adang (2013:246), *perubahan kebudayaan* mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial.

berharap yang timbul dari perubahan tersebut adalah kebaikan bagi mereka, masyarakat harus menerima konsekuensi dari perubahan yang terjadi. Masyarakat mungkin menyadari proses perubahan sosial yang terjadi, menduga arahnya dan mengharapkan dampak khususnya namun dugaan itu ternyata keliru sama sekali. Proses yang terjadi justru berlawanan dengan harapan mereka dan menimbulkan hasil yang sama sekali berlawanan dengan yang diharapkan semula.

Sztompka dalam Scott (2011: 32) memaparkan dampak perubahan akan berbeda-beda dalam hal skala, signifikansi, terhadap keseluruhan bidang/wilayah, dan tempo. Beberapa perubahan terjadi secara internal di dalam bidang tersebut. Perubahan tersebut berulang dan berkelanjutan atau memproduksi bidang/wilayah tersebut secara utuh. Contoh: akan berubah dalam rutinitas sehari-hari sebuah keluarga, naik turunnya perdagangan dari pagi sampai petang, atau rangkaian tenaga kerja musiman dalam komunitas petani. Perubahan lain menyebabkan perubahan kualitatif, dan pembatasan atau pengurangan sifat dasar dari keseluruhan bidang/wilayah. Paling sering, hal ini menyebabkan perubahan struktur dan fungsi, seperti munculnya kapitalisme, demokratisasi sistem politik, dan sekularisasi masyarakat modern. Perubahan sosial yang demikian ini adalah perubahan sosial yang bersifat komprehensif, mencakup banyak aspek dalam bidang/ wilayah tersebut, dan yang paling relatif cepat juga revolusi sosial.

D. Perencanaan Pembangunan

Menurut Reksoproetranto (1992:46), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber daya alam, manusia, keuangan, yang terbatas adanya, serta unsur-unsur sosial budaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, melalui kebijakan pemerintah. Perencanaan pembangunan merupakan persiapan untuk merumuskan kebijaksanaan pemerintah, serta proyek pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dipilihnya dan disetujui oleh rakyat suatu negara.

Sjafrizal (2009:14) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara dan daerah yang bersangkutan. Seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India M.L. Jhingan dalam Sjafrizal (2009:14), memberikan definisi kongkrit tentang perencanaan pembangunan. Menurutnya, perencanaan pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan pembangunan menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 sistem perencanaan pembangunan nasional (SSPN) adalah suatu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Serangkaian definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan berarti segala sesuatu yang dipersiapkan dengan matang yang dalam proses perumusannya mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, memungkinkan memilih cara yang terbaik dalam pembangunannya dan yang terpenting hasil dari pembangunannya menguntungkan atau tidak. Semuanya dapat terukur melalui usaha yang kuat dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai subyek pembangunan dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dipilihnya disetujui oleh rakyat sebagai obyek pembangunannya.

Tjokroamidjojo dalam Reksopoetranto (1992:46) menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan dalam kegiatan pembangunan dari segi alat/cara mencapai tujuansebagai berikut:

- (1) Perencanaan memberikan pengarahan kegiatan, serta pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
- (2) Perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian keadaan dapat dikurangi, melalui pemikiran (*forecasting*) mengenai potensi-potensi dan prospek perkembangan, serta pula mengenai hambatan-hambatan dan kemungkinan kegagalan;
- (3) Perencanaan memberikan kemungkinan memilih cara dan kombinasi cara yang terbaik dalam pembangunan;

- (4) Dengan perencanaan, dapat disusun daftar urutan pentingnya sasaran dan kegiatan usaha;
- (5) Sebuah rencana merupakan alat pengukur untuk pengawasan dan penilaian;
- (6) Peningkatan efisiensi (daya guna) dalam alokasi sumber-sumber daya yang langka dan terbatas untuk kegiatan pembangunan;
- (7) Memantapkan perkembangan ekonomi;
- (8) Lebih tahan dalam menghadapi turun naiknya keadaan ekonomi dunia.

E. Tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2009: 38), secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan. Tahap pertama adalah penyusunan rencana, tahap kedua penetapan rencana, tahap ketiga pengendalian pelaksanaan rencana dan tahap keempat evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

(a) Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangna rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggungjawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga

perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh badan perencana sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait. Hal ini sangat operasional dengan menjaga antara keterkaitan dengan pelaksanaannya.

(b) Tahap Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

(c) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.

(d) Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggungjawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula dievaluasi, bagaimana kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*out-come*) sesuai dengan yang direncanakan semula. Sesuai dengan PP No. 8 tahun 2006, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan Metode Evaluasi Kinerja yang paling kurang didasarkan pada 3 unsur evaluasi utama yaitu unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan kriteria evaluasi secara lengkap mencakup 6 unsur dengan tambahan menyangkut dengan evaluasi proses, manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Di samping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan keberhasilannya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk penyusunan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

F. Kerangka Pikir

Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) oleh pemerintah telah direncanakan pembangunannya di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dianggap tepat sebagai tempat pembangunan kampus Nasional ini karena tempatnya yang strategis mudah dijangkau dan paling dekat dengan pulau Jawa. Pembangunan kampus ITERA akan banyak memunculkan pengaruh dan dampak-dampak bagi masyarakat Provinsi Lampung terlebih masyarakat di sekitar lokasi pembangunan kampus ini.

Pembangunan kampus ITERA menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang terencana dan diharapkan. Karena pembangunannya meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya, maka yang menjadi tujuan pembangunan ini adalah untuk membangun sumberdaya manusia. Di sisi lain perlu diperhatikan juga bahwa bagi pihak-pihak tertentu, pembangunan tidak selalu memberikan kesejahteraan. Dalam konteks perubahan sosial, pembangunan juga justru membuat terkikisnya nilai-nilai lokal. Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Pembangunan tidak saja mencakup masalah ekonomi, tetapi memiliki andil dalam perubahan sosial.

Konsekuensi negatif perubahan sosial akibat adanya pembangunan harus bisa diminimalisir pada tahap awal (pascaperencanaan ITERA), untuk kembali

mengoptimalkan faedah pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal. Perlu ada strategi-strategi yang dilakukan masyarakat lokal agar terhindar dari bentuk *marginalisasi* untuk bertahan dalam persaingan bahkan bisa memanfaatkan peluang dengan adanya pembangunan kampus ITERA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) dan kesejahteraan hidup (*welfare being*).

G. Skema Kerangka Berfikir

